

Analisis standarisasi prosedur pendaftaran fidusia dan implementasinya dalam praktek

Patricia Sondang R., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=111209&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan dunia investasi dan perdagangan Indonesia seperti diuraikan diatas tersebut menyebabkan hukum jaminan menempati kedudukan yang semakin penting. Kegiatan investasi dan perdagangan memerlukan pembiayaan. Pembiayaan tersebut antara lain diperoleh melalui kredit. Kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan, karena pemberian kredit sering menimbulkan permasalahan bagi kreditur, jika pengembalian pinjaman dari debitur tidak sesuai perjanjian kredit. Masalah pengamanan jaminan kredit dari aspek hukum adalah sebagai tindakan preventif dalam pemberian kredit.

Jaminan Fidusia merupakan suatu jaminan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik, sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur, karena itu perlu dilakukan pendaftaran untuk memperoleh kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Fidusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis melakukan kajian terhadap Hukum Jaminan dengan penekanan mengenai Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia. Di mana dengan terbitnya Surat Edaran Nomor:C.HT.01.10-22 terutama pada ketentuan angka 2, 3 dan 7 dari surat edaran tersebut. Di samping itu akan dilihat implementasinya dalam praktek.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data yang bersifat yuridis-normatif yang ditambahkan dengan wawancara yang dilakukan oleh pihak terkait dengan masalah pendaftaran fidusia. Hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris-analitis karena analisa datanya menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Dimana dalam kesimpulannya akan mengetahui tujuan dari diterbitkannya surat edaran terutama ketentuan angka 2, 3 dan 7 untuk memperoleh kepastian hukum mengenai benda yang didaftarkan dengan jaminan fidusia sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan implementasinya dalam praktek bahwa ketentuan dalam surat edaran tersebut memberikan penafsiran yang berbeda dari berbagai praktisi hukum.

<hr>

The dynamic development in the realm of investment and trade in Indonesia has made the growing importance of the law of guarantee. Investment and trade activities need financing, one way of which is through credit rendering. The need for credit rendering as well as its facilities needs a guarantee, particularly in the side of the creditor, in order to avoid any risk of losing the investment profit expected in case the debtor doesn't comply with the agreement made before. Regarded from the law point of view, security on the credit guarantee is considered as a preventive act in lending a credit.

A fiduciary right is defined as the guarantee of the transfer of ownership based on trust. The transfer merely happens in the ownership, while the real control still lies on the debtor, the reason of which it is necessary to

register it in order to ensure the legal certainty which is in accordance with the Fiduciary Law. With respect to that matter, the writer would like to conduct a research towards the Guarantee Law with emphasis on the Standardization of the Fiduciary Registration Procedures, which is based on the Verdict No. C.HT.OI.10-22, particularly regarding to the one mentioned in number 2, 3 and 7 within. The implementation also will be one of the matter addressed in this thesis.

This this research is conducted by applying the library study method, using the juridical normative data, supported by in-depth interview with the party concerned on the fiduciary registration matter. The result takes form in an explanatory-analytical, since the data analysis applying the qualitative descriptive method. Based on the elaboration, a conclusion will be drawn that is expected to be able to identify the purpose of the issuing of the verdict, particularly related to the number 2, 3 and 7, in attaining a legal certainty concerning the material registered under the fiduciary guarantee, whether it is already in accordance with the one mentioned in the law or not. Meanwhile concerning the matter of implementation, it will try to address whether the verdict opens any possibility to a different interpretation among the law practitioners.